**MAKALAH**

**Urgensi Konstitusi dalam Bebangsa dan Bernegara**

****

Disusun Oleh :

Ruben Ximenes Pereira ( 2113191033 )

Muhammad Taufiq Hidayatuloh ( 2113191036 )

Spenyel Kambu ( 2113191041 )

Riyandi Adiwijaya ( 2113191042 )

Taufik Ridwan ( 2113191044 )

Alfianto Yogatama ( 2113191104 )

Yelse Lispianti Rahayu ( 2113191106 )

Yogi Setiawan ( 2113191107 )

**Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik**

**Universitas Sangga Buana YPKP Bandung**

**2020**

**Kata Pengantar**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah Urgensi Konstitusi dalam Bebangsa dan Bernegara ini dengan baik. Makalah ini dibuat agar menambah sedikit pengetahuan kita mengenai pengetahuan dasar konstitusi, sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya Urgensi Konstitusi dalam Bebangsa dan Bernegara itu, secara mendalam dan terperinci.

Penulisan makalah ini dapat terselenggara berkat sumber-sumber referensi yang sangat membantu mengenai Urgensi Konstitusi dalam Bebangsa dan Bernegara dan untuk itu penulis mengucapakan terimakasih atas bantuan materi-materinya yang sangat bermanfaat.

Saya mohon maaf jika makalah ini banyak kekurangan maka dari itu saya mengharapkan agar para pembaca makalah ini dapat memberikan saran serta kritiknya untuk perbaikan yang semestinya.

Bandung, 16 Maret 2020

Penyusun

**Daftar Isi**

**Kata Pengantar i**

**Daftar Isi ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**
  2. **Tujuan**
  3. **Rumusan Masalah**

**BAB II PEMBAHASAN**

**2.1 Definisi Konstitusi**

**2.2 Fungsi dan Tujuan Konstitusi**

**2.3 Kedudukan Konstitusi**

**2.4 Materi Konstitusi**

**2.5 Nilai Konstitusi**

**2.6 Sistem Ketatanegaraan**

**BAB III PENUTUPAN**

**Kesimpulan**

**Daftar Pustaka iii**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (Bhs. Inggris) – *constitutie*(Bhs. Belanda) – *constituer* (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD.

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.

konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut. sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi. Oleh karena itu dalam makalah ini dibuat untuk lebih memahami bagaimana itu konstitusi.

* 1. **Tujuan**

Makalah Urgensi Konstitusi dalam Bebangsa dan Bernegara ini untuk meemenuhi nilai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan untuk lebih paham lagi tentang konstitusi.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Apa definisi konstitusi ?
2. Bagaimana fungsi dan tujuan konstitusi ?
3. Bagaimana kedudukan konstitusi ?
4. Bagaimana materi konstitusi ?
5. Bagaimana nilai konstitusi ?
6. Bagaimana sistem ketatanegaraan ?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Definisi Konstitusi**

konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Constitution”, dan berasal dari bahasa Belanda “constitutie”. Dalam bahasa latin (contitutio,constituere), sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu “constiture”. Dalam bahasa Jerman yaitu “vertassung, konstitution”, sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara

Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

**2.2 Fungsi dan Tujuan Konstitusi**

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan.

Konstitusi berfungsi:

* Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;
* Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya;
* Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;
* Menjamin hak-hak asasi warga negara.

Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wanang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat.

Tujuan konstitusi yaitu:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.

2. Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak Tujuan memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

3. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh

**2.3 Kedudukan Konstitusi**

Kedudukan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting karena menjadi suatu ukuran untuk mengetahui aturan pokok yang berlaku bagi penyelenggara negara ataupun masyarakat dalam suatu sistem ketatanegaraaan**.**

Kedudukan konstitusi/UUD yaitu:

1. Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
2. Sebagai hukum dasar.

Konstitusi sebagai hukum dasar dikarenakan dalam konstitusi terdapat aturan aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta adanya suatu bentuk dan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.

1. Sebagai hukum yang tertinggi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi dikarenakan konstitusi memunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan-peratuan lain yang ada dalam ketatanegaraan.

**2.4 Materi Konstitusi**

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

riode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Periode 5 Juli 1959 – sekarang

* **Jenis-jenis Konstitusi**

Jenis konstitusi terdiri dari dua macam, diantaranya adalah :

1. Konstitusi tertulis berupa naskah yang menjelaskan kerangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan dimana naskah tersebut turut menentukan cara kerja dari suatu badan pemerintahan. konstitusi ini disebut undang-undang dasar.
2. Konstitusi tidak tertulis berupa suatu aturan tetapi tidak tertulis yang ada dan senantiasa dipelihara dalam praktik penyelenggaraan sistem kenegaraan. Konstitusi jenis ini biasa disebut sebagai konvensi. Syarat-syarat agar suatu konstitusi dapat disebut sebagai konvensi adalah konstitusi tersebut diakui dan digunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

Sedangkan secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Konstitusi politik yang berisikan norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga.
2. Konstitusi sosial yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan oleh bangsa tersebut.

* **Unsur-unsur Konstitusi**

Menurut seorang ahli bernama Lohman, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi adalah :

1. Konstitusi sebagai suatu perwujudan kontak sosial dimana konstitusi menjadi sebuah perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara warga negara dengan Pemerintah.
2. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia yang menjadi penentu hak dan juga kewajiban warga negara dan badan pemerintah.
3. Konstitusi sebagai forma regiments yang merupakan kerangka pembanguan dari pemerintah.

* **Sifat Konstitusi**

Menurut pendapat dari C.F. Strong, suatu konstitusi dapat bersifat kaku dan juga dapat bersifat supel tergantung dari apakah prosedur untuk mengubah konstitusi tersebut sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang dari negara yang bersangkutan ataukah belum. Berdasarkan hal tersebut, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kaku

Konstitusi yang sifatnya kaku atau rigid, yang hanya dapat diubah melalui prosedur berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

1. Supel

Konstitusi yang sifatnya supel atau flexibel dimana konstitusi dapat diubah melalui sebuah prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

**2.5 Nilai Konstitusi**

Nilai konstitusi yaitu:

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan Nilai dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

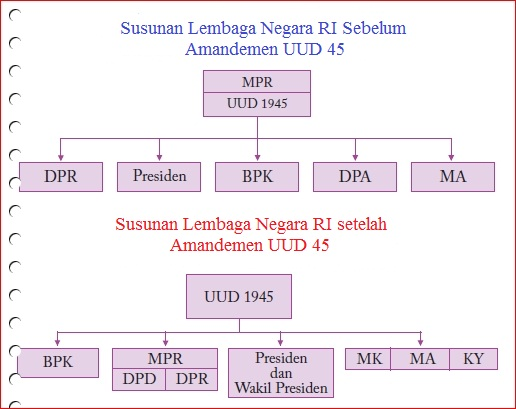
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

**2.6 Sistem Ketatanegaraan**

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa indonesia, namun sistem ketatanegaraan Republik indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu.

Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban.

Struktur pemerintahan negara Indonesia

****

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Negara diantaranya :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) MPR merupakan lembaga negara(bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD 1945) yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif.

Fungsi, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut:

* Mengubah dan menetapkan UUD
* Melantik presiden dan wakil Presiden
* Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif. Wewenang DPR:

* Membuat Undang-undang
* Menetapkan APBN
* Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang

1. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Wewenang:

* Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
* Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
* Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
* Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

1. Presiden dan Wakil

Presiden Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan wkil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945 sekarang.

Wewenang Presiden sebagai kepala negara :

* membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR
* mengangkat duta dan konsul
* menerima duta dari negara asing
* memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia.

Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan:

* menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD
* berhak mengusulkan RUU kepada DPR
* menetapkan peraturan pemerintah

1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Wewenang MA antara lain:

* Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
* memiliki weweang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-udangan dibawah UU terhadap UU
* mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
* memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)

1. Mahkama Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2)

* untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD.
* memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
* memutus pembubaran partai politik.
* memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

1. Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Wewenang :

* Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
* Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
* Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
* Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

1. Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.

**BAB III**

**PENUTUPAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstitusi bersifat kaku atau rigid, yang hanya dapat diubah melalui prosedur berbeda.
2. Konstitusi bersifat supel atau flexibel dimana konstitusi dapat diubah melalui sebuah prosedur yang sama.
3. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga Negara.
4. Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar Negara dan warga Negara

**Daftar Pustaka**

<https://www.coursehero.com/file/38873765/Urgensi-konstitusi-dalam-kehidupan-berbangsa-bernegaradocx/>

<https://irvanhermawanto.blogspot.com/2018/04/Konsep-dan-Urgensi-Konstitusi-dalam-Kehidupan-Berbangsa-Negara.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>

<https://belajargiat.id/konstitusi/>

<https://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html>